

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS RESOR TANAH DATAR UNTUK
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DI LAKUKAN OLEH PELAJAR DI BATUSANGKAR**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Diajukan Oleh:
FEBBY ELVILIA
NPM. 2110012111191**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

Reg. No.: 14/PID-02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 14/PID-02/III-2025

Nama : Febby Elvilia
Nomor : 2110012111191
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Datar untuk Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan oleh Pelajar di Batusangkar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Reg. No.: 14/PID-02/III-2025

THE EFFORTS OF THE TANAH DATAR RESORT TRAFFIC POLICE TO REDUCE TRAFFIC VIOLATIONS COMMITTED BY STUDENTS IN BATUSANGKAR

Febby Elvilia¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : febbyelvilia4@gmail.com

ABSTRAK

Traffic violations by students are a common problem, especially in Batusangkar. Based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, every driver must meet the requirements. Research Problems: (1) What are the police's efforts to reduce the number of traffic violations in Tanah Datar Regency, and (2) What are the obstacles for the police in reducing the number of traffic violations in Tanah Datar Regency. This research is juridical-sociological with a qualitative approach. This research uses primary and secondary data. Primary data were collected through interviews and observations, secondary data were collected through document studies. Data were analyzed descriptively. Research results: (1) the police implement three main strategies: pre-emptive efforts through socialization in schools and the community, preventive efforts by installing traffic signs, patrols, and supervision in zones prone to violations, and repressive efforts in the form of fines and confiscation of vehicles for violators. (2) Police obstacles in reducing the number of traffic violations in Tanah Datar Regency: low legal awareness among students, lack of synergy between the police and parents and schools, and tolerance for minor violations. Therefore, closer collaboration is needed between the police, schools, and parents in traffic education, increased supervision, and the application of stricter sanctions to reduce the number of traffic violations by students.

Keywords: *Traffic Violations, Police, Students, Law Enforcement, Tanah Datar*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat, terkhusus teknologi yang dihasilkan tersebut sangat membantu setiap orang dalam melakukan sesuatu agar menjadi lebih muda, seperti halnya kendaraan bermotor yang di yakini dapat mempermudah segala aktivitas yang awalnya untuk menuju suatu tempat yang ditempuh dalam waktu cukup lama, namun dengan perkembangan kendaraan bermotor membuat tujuan yang hendak dicapai semakin terasa dekat. Akan tetapi, perkembangan kendaraan bermotor tidak sejalan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang memanfaatkan semua perkembangan tersebut, sehingga kendaraan bermotor yang tadinya memberikan manfaat dan membantu segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, justru menimbulkan masalah baru yang dapat memberikan efek buruk bagi diri penggunanya dan bahkan

untuk orang-orang yang berada disekitarnya, sangat diperlukan adanya peraturan atau norma yang bertujuan untuk mengawasi pemanfaatan kendaraan bermotor benar-benar digunakan dengan baik atau tidak.

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman menjalankan kehidupan dan setiap perbuatan yang dilakukan agar sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan. Dengan demikian, peraturan yang secara khusus untuk mengatur tentang tindakan dan perbuatan manusia akan sangat membantu agar keberlangsungan hidup manusia tersebut tetap terjaga dengan rukun dan harmonis antar sesamanya. Fenomena pelanggaran lalu sangat marak terjadi terutama dilakukan oleh pelajar di daerah Kabupaten Tanah Datar yang termasuk wilayah hukum dari Kepolisian Resor Tanah Datar. Padahal secara aturan yang berlaku, dalam menggunakan kendaraan bermotor

tentu harus memenuhi syarat-syarat yang seharusnya sesuai seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti disebutkan dalam Pasal 106 UU LLAJ. Apapun jenis kendaraannya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu kewajiban bagi setiap pengendara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi lalu lintas, harus melakukan pengawasan agar peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor dipatuhi. Polisi lalu lintas mempunyai tugas serta wewenang khusus yang harus di jalankannya sehari-hari sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggung jawab tersebut antara lain menjaga ketertiban, keamanan dan Kelancaran lalu lintas.

Mencegah pelanggaran lalu lintas serta menurunkan frekuensinya merupakan tugas polisi lalu lintas, berdasarkan data dari situs Kompas.com diketahui jumlah kendaraan yang melanggar lalu lintas mencapai 60.533 pengguna di seluruh Indonesia. Dari data yang saya dapat di Satlantas Polres Tanah Datar mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Budaya selama triwulan pertama 2023 sebanyak 150 berkas bukti tilang. Triwulan kedua sebanyak 287 berkas bukti tilang. Triwulan ketiga sebanyak 683 berkas bukti tilang. Triwulan keempat terdapat 682 berkas bukti pelanggaran dengan total denda keseluruhan sebanyak Rp 101.931.000 (seratus satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Faktanya pelanggaran yang terjadi mayoritas dilakukan oleh kalangan pelajar dengan kesalahan yang ditemukan adalah tindak menggunakan atribut keamanan saat berkendara salah satunya helm.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI BATUSANGKAR”**

B. Rumusan permasalahan

1. Apa upaya kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar?

2. Apa kendala kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis kendala kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sumber data terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Baur Tilang Satlantas Polres Tanah Datar dan Anggota Satlantas Polres Tanah Datar. Sedangkan data sekunder dari data kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang ditangani Satlantas Tanah Datar dari Tahun 2022 sampai dengan 2024.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian untuk Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Tanah Datar

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta benar, termasuk melaksanakan pembinaan untuk memastikan terciptanya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam lalu lintas. Selain itu, kepolisian harus mengeluarkan regulasi yang berlaku secara umum untuk menciptakan kerangka aturan yang jelas. Dalam hal ini, diperlukan strategi dan upaya dari pihak kepolisian untuk mencapai tujuan yang merupakan bagian dari tugas dan kewajiban kepolisian.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Batusangkar, diantaranya dengan menggunakan Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif (Pencegahan Dini)

- a. Sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai dan norma berlalu lintas yang baik.
 - b. Penyuluhan dan pelatihan safety riding bagi pelajar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan keselamatan di jalan.
2. Upaya Preventif (Pencegahan)
- a. Pemasangan rambu lalu lintas di titik-titik strategis, terutama di sekitar sekolah, untuk memberikan petunjuk kepada pengendara dan mengurangi pelanggaran.
 - b. Pengaturan lalu lintas dan patroli di daerah rawan kecelakaan atau pelanggaran, seperti di sekitar sekolah dan pada waktu tertentu, seperti malam minggu.
 - c. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh pelajar, seperti balap liar atau ugal-ugalan di jalan.
3. Upaya Represif (Penindakan)
- a. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang dan penyitaan kendaraan, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelanggar.
 - b. Penegakan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm atau mengemudi ugal-ugalan.

A. Kendala Kepolisian dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Tanah Datar

Satlantas Tanah Datar memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh para pelajar di Batusangkar, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Namun, dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Tanah Datar sering dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas tugas mereka seperti kesadaran hukum pada pelajar yang

masih kurang, kurangnya sinegritas orang tua pelajar dengan kepolisian, serta kurangnya sinegritas guru disekolah dengan kepolisian, yang semuanya memerlukan perhatian dan solusi yang menyeluruh agar upaya penegakan hukum dan pendidikan lalu lintas dapat berjalan dengan lebih optimal.

Dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Tanah Datar, yaitu:

1. Kesadaran Hukum pada Pelajar yang Masih Kurang

Pengetahuan adalah informasi yang memungkinkan seseorang membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan harus memahami aturan lalu lintas yang tertuang dalam berbagai peraturan resmi, sehingga tercipta pemahaman dan kesadaran dalam berinteraksi di jalan raya. Selain pengetahuan, kesadaran juga penting agar masyarakat tidak melanggar aturan, karena mereka menyadari bahwa pelanggaran adalah tindakan yang salah.

Namun, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, tentang peraturan lalu lintas masih kurang. Meskipun telah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, banyak pelajar yang masih melanggar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran, yang seharusnya didukung oleh pengetahuan. Untuk menciptakan keamanan di jalan, selain informasi, sikap sadar untuk mematuhi peraturan lalu lintas juga diperlukan. Meskipun sudah ada upaya pemberian informasi, kesadaran untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas belum sepenuhnya terbentuk.

2. Kurangnya Sinegritas Orang Tua Pelajar dengan Kepolisian

Sinegritas antara orang tua dan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sangat penting. Orang tua berperan dalam memberikan pendidikan dan contoh baik, sementara kepolisian memberikan edukasi tentang risiko

pelanggaran lalu lintas. Kolaborasi ini dapat mengurangi perilaku berisiko pelajar. Melalui program bersama seperti seminar, diharapkan tercipta kesadaran kolektif yang mendorong disiplin dan tanggung jawab di jalan raya. Kurangnya kerjasama antara orang tua dan kepolisian menjadi hambatan dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar di Batusangkar. Banyak orang tua memberikan kebebasan berlebihan pada anak untuk berkendara meskipun belum memenuhi syarat usia dan keterampilan. Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat penting demi keselamatan anak dan pengguna jalan lainnya.

3. Kurangnya Sinergitas Guru di Sekolah dengan Kepolisian

Sinergitas antara guru dan kepolisian sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pelajar tentang keselamatan, mengurangi perilaku berisiko, serta menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah, karena dengan menjalin kerjasama yang baik, kedua pihak dapat saling melengkapi dan berkontribusi secara optimal dalam mendidik serta melindungi generasi muda, sehingga diharapkan tercipta lingkungan yang lebih baik dan aman bagi mereka, dimana pelajar tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai aturan lalu lintas dan keselamatan, tetapi juga merasa didukung dan diperhatikan oleh kedua instansi dalam upaya menciptakan budaya disiplin dan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya serta di lingkungan sekitar mereka.

Oleh karena itu kerjasama (sinergitas) semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yakni memberikan keselamatan pada pelajari dan orang lain dalam berlalu lintas, orang tua dan guru di sekolah semuanya sangat penting dalam membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, ketika anak luput dari pengawasan orang tua maka aparat

Kepolisian yang terakhir memberikan pengawasan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Batusangkar, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar telah melakukan sejumlah upaya. Pertama, Upaya pre-emptif yaitu tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah. Kedua, upaya preventif seperti patrol rutin, pemasangan rambu lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan kehadiran polisi. Ketiga, upaya represif yaitu dengan memberikan surat tilang, menyita kendaraan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan memberikan peringatan dengan syarat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
2. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di daerah Batusangkar mencakup beberapa faktor penting. Pertama, tingkat kesadaran hukum di kalangan pelajar masih tergolong rendah, yang mengakibatkan mereka kurang memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, terdapat juga masalah terkait kurangnya sinergitas antara orang tua pelajar dan pihak kepolisian, yang dapat menghambat upaya untuk mengedukasi dan menegakkan disiplin mengenai keselamatan berlalu lintas. Selain itu, kurangnya kerjasama antara guru di sekolah dan kepolisian juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini, sehingga program-program edukasi dan penegakan hukum yang seharusnya dapat dilakukan secara terintegrasi tidak berjalan dengan efektif. Semua kendala ini perlu diatasi agar upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dapat berjalan dengan lebih baik.

B. SARAN

1. Kepolisian lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk para pelajar.
2. Kepolisian bekerja sama dengan sekolah dengan cara merekrut para siswa untuk membantu menertibkan lalu lintas di zona sekolah pada jam-jam tertentu.

3. Pihak sekolah secara proaktif melaksanakan sosialisasi tentang berlalu lintas yang baik pada para siswa.
4. Pemerintah menambah jalur trayek sehingga dapat menjangkau diseluruh daerah sehingga mempermudah akses para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anny Yuserlina, 2019, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*, Bukittinggi.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Offset, Edisi Refisi, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.